

**MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BULELENG**

Oleh: Made Jaka Arisudana¹ dan Dewa Nyoman Redana²

Abstraksi

Wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas dengan potensi terjadinya bencana cukup tinggi memerlukan kesiapsiagaan berbagai pihak untuk mengantisipasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlunya manajemen penanggulangan bencana demi meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ? ; 2) apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ? ;

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan empat langkah yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan/pengendalian (*controlling*).

Faktor pendukung internal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah adanya SOP dan pedoman tentang tatacara penanggulangan bencana yang menjadi acuan bagi para pegawai di BPBD Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan penanggulangan bencana. Pendukung eksternalnya adalah terbentuknya beberapa komunitas relawan serta kerjasama dengan Undiksha dengan membentuk Kampus Siaga Bencana. Faktor penghambat internalnya adalah masih kurangnya jumlah SDM dan sarana prasarana yang dimiliki untuk penanggulangan bencana. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan dan mitigasi bencana.

Kata kunci : manajemen, penanggulangan bencana.

¹Staf BPBD Kabupaten Buleleng email arisudanajaka@gmail.com

²Staf Pengajar UNIPAS email dewa.redana@unipas.ac.id

I. Pendahuluan

Bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang secara alami maupun karena ulah manusia, terjadi secara mendadak atau berangsur-angsur, dan menimbulkan akibat yang merugikan, sehingga masyarakat dipaksa untuk melakukan tindakan penanggulangan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang rawan akan bencana. Hal ini disebabkan karena secara geografis, Indonesia berada diantara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga akibatnya rawan terkena bencana Tsunami. Wilayah Indonesia juga dikenal sebagai wilayah tektonik (lempeng) aktif, hal itu disebabkan karena Indonesia berada di tiga lempeng tektonik aktif utama, yaitu “Eurasia di sebelah utara, Samudera hindia-australia di sebelah selatan, dan lempeng pasifik di timur “ (Kusumasari, 2014 : 74)

Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia diantaranya meliputi gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias tahun 2005, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, dan berbagai peristiwa bencana alam lainnya. Peristiwa tersebut cukup menjadi bukti bahwa Indonesia adalah wilayah yang rawan akan bencana. Fakta inilah yang kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dirumuskan tentang pengertian bencana dan jenis-jenis bencana yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dalam undang-undang ini dijabarkan juga jenis-jenis bencana yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
3. Bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis bencana di atas, bisa dikatakan bahwa bencana dapat memiliki dampak yang serius dan menimbulkan kerusakan baik itu kerusakan di bidang ekologi, ekonomi, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang berkaitan erat dengan manusia dan lingkungannya. Untuk mengatasi hal itu, maka Pemerintah Indonesia berusaha melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana yang terjadi, dengan cara membuat suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pembentukan lembaga penanggulangan bencana ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bencana dan juga dapat mengurangi resiko bencana. Selain di tingkat pusat, lembaga penanggulangan bencana juga dibentuk di daerah-daerah, yang diberi nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan salah satunya berada di Kabupaten Buleleng.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. BPBD Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya potensi ancaman bencana di Kabupaten Buleleng yang sering terjadi adalah berupa gempa bumi, tanah longsor, angin ribut/angin puting beliung, banjir, tsunami, kekeringan, dan kebakaran.

Hal ini disebabkan letak geografis kabupaten Buleleng yang terdiri dari daerah pegunungan dan struktur tanah yang labil, serta berada di daerah pesisir utara Pulau Bali, dimana potensi bencana terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Dengan mempertimbangkan potensi bencana yang muncul, maka diperlukan adanya manajemen

penanggulangan bencana yang baik dan terencana untuk meminimalkan resiko yang terjadi akibat adanya bencana.

Pada praktiknya BPBD yang meliputi kegiatan menganalisis pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Manajemen penanggulangan bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, aktuating (pengarahan/penggerakan), dan pengawasan. Semua fungsi-fungsi manajemen tersebut menjadi acuan dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng.

Selama kurun waktu 4 (empat tahun) yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, BPBD Kabupaten Buleleng mencatat dan menangani puluhan bahkan ratusan bencana alam dan non alam yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Bencana alam dan non alam tersebut diantaranya adalah : tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, angin puting beliung, gempa bumi, pohon tumbang, dan bencana lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor BPBD Kabupaten Buleleng tentang kejadian bencana alam yang terjadi selama 4 (empat) tahun , diketahui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang rawan dan sering terjadi bencana alam. Untuk itu diperlukan manajemen penanggulangan bencana yang baik supaya dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” Manajemen Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng ”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Arikunto (2013 : 12) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi hanya menggunakan kata-kata. Sedangkan menurut Bungin (2014 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPBD, Para Kepala Bidang, serta pegawai baik PNS maupun pegawai kontrak di BPBD Kabupaten Buleleng. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Dalam artian, informan yang ditunjuk memiliki tujuan untuk dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini jumlah informan tidak dibatasi, melainkan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2014: 170).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng yang meliputi: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan/pengendalian)
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian ini mengambil lokasi di BPBD Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, dan data-data yang diperlukan cukup tersedia. Selanjutnya pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan analisis data kualitatif, dimana analisis data memakai empat tahapan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Milles

dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Manajemen Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Buleleng

Manajemen penanggulangan bencana merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, pihak BPBD menerapkan pola pengelolaan atau manajemen yang berpedoman pada : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Suatu “perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik” (Darmawan dan Suprpta, 2020: 31). Terkait perencanaan dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng, maka kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan dan target kinerja.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yakni, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD, dan Penata Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng , didukung hasil observasi di lokasi penelitian dapat dipahami bahwa perencanaan memang harus selalu dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan dengan maksud untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Terry (Hasibuan, 2012) bahwa perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur demi mencapai tujuan organisasi ataupun untuk memecahkan

masalah tertentu. Selanjutnya menurut Amirullah (2015 : 8), bahwa kegiatan utama dalam fungsi perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan dan target kinerja.

Kegiatan berikutnya dari fungsi utama manajemen adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, wawancara dilakukan dengan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris BPBD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana dan Sekretaris BPBD Kabupaten Buleleng , dapat diketahui bahwa perencanaan untuk merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja BPBD Kabupaten Buleleng mutlak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Amirullah (2015 : 8), bahwa merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja seperti yang telah ditetapkan, merupakan bagian dari kegiatan utama dalam fungsi perencanaan.

Hal selanjutnya yang dilakukan sebagai kegiatan dalam fungsi perencanaan adalah menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh untuk bisa terlaksananya manajemen penanggulangan bencana dengan sebaik-baiknya. Sumber daya disini yang utama adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (anggaran) Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang informan, dapat dipahami bahwa menentukan sumber-sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (anggaran) menjadi hal yang sangat penting sebagai kegiatan dalam perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Amirullah (2015 : 8) bahwa menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh merupakan salah satu kegiatan utama dalam fungsi perencanaan.

Yang terakhir dari kegiatan utama dalam fungsi perencanaan di BPBD Kabupaten Buleleng adalah menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut wawancara dilakukan dengan dua orang informan yakni Kepala Pelaksana BPBD dan seorang pegawai Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kedua orang informan tersebut, dapat dipahami bahwa menetapkan standar atau indikator terhadap keberhasilan dalam pencapaian target khususnya target kinerja BPBD Kabupaten Buleleng, merupakan langkah awal sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh

Amirullah (2015 : 8), bahwa kegiatan utama dalam fungsi perencanaan salah satunya adalah menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

Perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan (Harsono, 2010 : 6). Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang pemimpin organisasi akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Menurut Amirullah (2015 : 8) bahwa menentukan target kinerja pada periode yang akan datang, berapa tingkat kebutuhan tenaga kerja, berapa anggaran yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya, dan keputusan apakah yang harus dilakukan seorang pemimpin merupakan bagian dari perencanaan kegiatan utama dalam fungsi perencanaan yang terdiri dari : (a) Menetapkan tujuan dan target kinerja ; (b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja tersebut; (c) Menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh; dan (d) Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

2.Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahapan selanjutnya dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah pengorganisasian (*organizing*). Menurut Amirullah (2015) pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, sumber daya serta pengaturan kegiatan secara koordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Sedangkan menurut Manullang (2012 : 5), bentuk pengorganisasian terdiri dari : penentuan sumber daya manusia, penyusunan organisasi atau kelompok kerja, dan penugasan wewenang.

Penentuan sumber daya manusia merupakan bentuk pengorganisasian, dalam hal ini jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan ditentukan bidang kerjanya sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Pelaksana, dan Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut dapat dipahami bahwa penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan merupakan tugas seorang pemimpin dalam konteks pengorganisasian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Manullang (2012 : 5) bahwa salah satu bentuk pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Tahapan selanjutnya dalam kegiatan pengorganisasian dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah penyusunan organisasi atau kelompok kerja. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan jumlah potensi bencana yang harus ditanggulangi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, didukung dengan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian serta melihat dokumen yang ada, dapat dipahami bahwa penyusunan organisasi atau pembagian kelompok kerja merupakan salah satu kegiatan dalam pengorganisasian di BPBD Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Amurillah (2015 : 8) yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian salah satunya adalah membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan atau unit-unit organisasi. Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Harsono (2010 : 7) yang mengatakan bahwa pengorganisasian adalah proses membentuk kerjasama antara dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai tujuan dan seperangkat tujuan.

Kegiatan selanjutnya sebagai bentuk pengorganisasian adalah penugasan wewenang. Dalam hal ini pimpinan memberikan tugas dan wewenang kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki pegawai. Memberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing pegawai ini penting supaya semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh dua orang informan, dapat dipahami bahwa pemberian tugas dan wewenang kepada masing-masing pegawai merupakan bentuk kegiatan pengorganisasian di BPBD Kabupaten Buleleng dimana pemberian tugas dan

wewenang haruslah disesuaikan dengan keahlian, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Manullang (2012 : 5), yang menyebutkan bentuk pengorganisasian salah satunya adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

3. *Actuating* (penggerakan)

Langkah ketiga dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah *actuating* (penggerakan). Poin penting *actuating* (penggerakan) adalah menggerakkan semua anggota kelompok dalam hal ini semua pegawai di BPBD Kabupaten Buleleng untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Setiap pelaku dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya demi mencapai visi misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian, dapat dipahami bahwa kegiatan dalam proses penggerakan atau *actuating* yang dilakukan oleh pimpinan di BPBD Kabupaten Buleleng adalah memimpin dengan baik, senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada bawahan, serta selalu menjalin komunikasi yang baik supaya pegawai mau bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Manullang (2012 : 6) bahwa poin penting penggerakan adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Juga disebutkan istilah lain dari penggerakan adalah pengarahan, yaitu proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Amirullah (2015 : 8) kegiatan dalam fungsi pengarahan adalah : (1) mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan; (2) memberikan tugas dan penjelasan ritun mengenai pekerjaan; dan (3) menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

4. *Controlling* (pengawasan/pengendalian)

Kegiatan terakhir dalam fungsi manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah *controlling* (pengawasan/pengendalian). Fungsi ini tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program, namun juga mengawasinya sehingga apabila terdapat kesalahan segera dapat dikoreksi. Dengan pengawasan/pengendalian, apa yang dikerjakan oleh staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, dapat dipahami bahwa pengawasan/pengendalian sangat dipentingkan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan fungsi pengawasan tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan organisasi, namun juga mengawasinya sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dikoreksi. Dengan ini apa yang dikerjakan oleh staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat, dengan maksud mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu (Amirullah, 2015 : 8). Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Manullang (2012 : 173), bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Buleleng

Manajemen penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentunya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung menjadi hal yang positif karena menyebabkan manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng berjalan lancar sesuai rencana dan mampu meminimalisir korban yang ditimbulkan oleh adanya bencana. Sedangkan faktor penghambat tentunya menjadi hal yang negatif karena berpotensi menjadi hal yang mempersulit proses penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buleleng.

1. Faktor Pendukung

Dukungan terhadap manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng muncul dari internal dan eksternal BPBD itu sendiri. Yang bisa disebut sebagai faktor pendukung internal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah adanya SOP tentang pedoman penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, didukung dengan hasil observasi serta melihat dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa adanya SOP tentang manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng memudahkan dan mendukung manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buleleng. Dalam buku pedoman tercantum segala hal yang berkaitan dengan kerangka kerja, tatacara penanggulangan bencana, serta tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen yang salah satunya mengatakan bahwa manajemen sebagai kerangka kerja, yaitu suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bidang atau unit atau komponen yang saling berkaitan, bergantung, dan terorganisasikan satu sama lain dalam mencapai tujuan (Siagian, 2006).

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung eksternal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah adanya terbentuknya beberapa komunitas relawan yang setiap saat siap membantu BPBD Kabupaten Buleleng dalam proses penanggulangan bencana. Juga adanya kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi yang ada di Buleleng dalam membentuk Kampus Siaga Bencana.

Menyimak hasil wawancara dengan tiga orang informan, didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian yakni di BPBD Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa terbentuknya beberapa kelompok relawan di berbagai desa di Kabupaten Buleleng serta kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dengan membentuk Kampus Siaga Bencana, menjadi faktor pendukung eksternal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng. Keberadaan kelompok relawan dan Kampus Siaga Bencana tersebut tentunya memudahkan BPBD Kabupaten Buleleng dalam mengorganisir dan mengerahkan para relawan tersebut dalam kegiatan penyelenggaraan manajemen bencana. Mereka juga dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang kebencanaan mulai dari fase pra-bencana,

tanggap darurat, dan pasca bencana. Dimana menurut Nurjanah (2013 : 99-101), bahwa kegiatan penyelenggaraan manajemen bencana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase atau tahapan, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pengetahuan dan pemahaman tentang hal tersebutlah yang harus diberikan kepada para relawan supaya mereka memahami apa yang harus dilakukan ketika mereka diatrijunker ke lokasi bencana.

Berdasarkan data yang ada di BPBD Kabupaten Buleleng, sampai saat ini sudah terbentuk 11 (sebelas kelompok relawan yang berasal dari berbagai desa di kabupaten Buleleng serta organisasi yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Kesebelas kelompok relawan tersebut sudah terdaftar di BPBD Kabupaten Buleleng, sehingga memudahkan pihak BPBD Kabupaten Buleleng untuk mengorganisir dan mengerahkan para anggota relawan tersebut ke lokasi bencana.

2. Faktor Penghambat

Di samping adanya faktor pendukung manajemen penanggulangan di BPBD Kabupaten Buleleng, seperti yang telah diuraikan di atas, tentunya akan ditemui pula faktor penghambat dari manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng. Faktor penghambat internal yang dapat dikemukakan di sini masih kurang jumlah personel pegawai tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng serta potensi bencana yang terjadi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, dapat dipahami bahwa jumlah SDM yang memiliki keahlian tenaga teknis kebencanaan di BPBD Kabupaten Buleleng masih sangat kurang jika harus menangani seluruh bencana yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas dengan potensi bencana yang cukup besar. Hal ini tentunya berdampak pada terkendalanya proses penanggulangan bencana apalagi jika dikaitkan dengan tiga tahapan penyelenggaraan manajemen bencana yakni pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang tentunya memerlukan keterlibatan banyak orang didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Nurjanah (2013: 99-101) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi : dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi : (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber

daya;(2)penentuan status keadaan darurat bencana;(3)penyelamatan dan evakuasi masyarakat terhadap masyarakat terkena bencana;(4)pemenuhan kebutuhan dasar;(5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (6)pemulihan dengan segera sarana dan prasarana.

Untuk bisa melaksanakan semua tahapan manajemen penanggulangan bencana tersebut, tentunya dibutuhkan jumlah SDM yang memadai dan memiliki keahlian yang mumpuni untuk melaksanakan semua itu, supaya manajemen penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik.

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Buleleng juga menjadi faktor penghambat internal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang merupakan pimpinan di BPBD Kabupaten Buleleng tersebut, didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian serta melihat data yang tersedia. dapat dipahami bahwa terhambatnya manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng salah satunya disebabkan karena terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada akan menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Buleleng dalam manajemen penanggulangan bencana.

Selanjutnya yang bisa disebutkan sebagai faktor penghambat eksternal manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah adanya pemahaman yang kurang dari masyarakat khususnya masyarakat yang tertimpa bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang informan, dapat dipahami bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang resiko bencana. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buleleng. Masalah tersebut seharusnya tidak boleh terjadi jika seluruh komponen yang terlibat dan peduli dengan penanggulangan bencana bahu-membahu serta bersinergi memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat lewat sosialisasi tentang bagaimana menghindarkan diri dari bencana, meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Jangan sampai karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat

tentang mitigasi bencana tersebut justru bisa berdampak timbulnya resiko yang lebih besar dari sebuah bencana.

Semua permasalahan yang menjadi penghambat dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng baik itu yang bersifat internal maupun yang eksternal sebisa mungkin untuk diminalisir dengan proses perencanaan yang tepat. Seperti yang disampaikan oleh Handoko (2012 : 79), bahwa ada empat tahap dalam perencanaan, salah satunya adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukut kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau mungkin menimbulkan masalah.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Dari uraian yang dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng meliputi Perencanaan yang mencakup : menetapkan tujuan dan target kinerja, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja, menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh dan menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target. Pengorganisasian mencakup : penentuan sumber daya manusia, penyusunan organisasi atau kelompok kerja, dan penugasan wewenang. Penggerakkan mencakup : memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi. Pengendalian/pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.
2. Faktor-faktor pendukung manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng terdiri dari faktor internal yaitu, adanya SOP tentang pedoman dan tatacara dalam proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung eksternalnya adalah terbentuknya kelompok-kelompok relawan di berbagai desa di Kabupaten Buleleng serta kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi. Selanjutnya faktor penghambat internalnya

adalah masih kurangnya jumlah SDM yang bertugas langsung dalam penanggulangan bencana. Juga terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang bisa digunakan dalam penanggulangan bencana. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana dan mitigasi bencana..

4.2. Saran-saran

Selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng hendaknya selalu mengedepankan unsur kecepatan dan ketepatan dalam membantu masyarakat yang terkena musibah bencana. Pembentukan komunitas-komunitas relawan harus terus digalakan supaya lebih banyak masyarakat yang mau terlibat dalam penanggulangan bencana. Sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan dan mitigasi bencana juga harus sering diadakan.
2. Semua faktor yang menjadi pendukung dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng hendaknya terus diupayakan dengan baik. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat supaya bisa segera diatasi bahkan sebisa mungkin tidak terjadi lagi.

Daftar Pustaka

Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Mitra Wacana Media : Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Raja Grafindo : Jakarta

Bungin, Burhan, 2014, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta

Darmawan, Nyoman Doddy dan I Nyoman Suprpta, 2020. "Strategi Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng". *Dalam locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2–Agustus2020 p.31*

Handoko, T.Hani, 2017, *Manajemen*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Harsono. 2010. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta

Hasibuan, Malayu S.P., 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara : Jakarta

Hendarso, Emy Susanti. 2012 , Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Kusumasari, Bevola, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media : Yogyakarta.

Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM: Yogyakarta

Nurjanah, dkk., 2013, *Manajemen Bencana*, Alfabeta : Bandung

Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung : Jakarta

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana